

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2013). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (cet. 2)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartini, Rahayu. (2007). *Hukum Kepailitan* (Edisi Revisi, Cetakan ke-2 ed.). Malang: UMM Press.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manik, Edward. (2012). *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2005). *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prayoga, Andhika. (2014). *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sjahdeni, Sutan Remy. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Edisi Baru ed.). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafitti.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (cet. 4)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subhan, M. Hadi. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan* (Edisi 2 ed.). Jakarta: Sofmedia.
- Susilowati, Etty. (2013). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Yani, dkk. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- FebriYanti Casanova. (2018). Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan. *Pactum Law Journal*, Volume 1 No. 2, Tahun 2018.
- Hartono, & Dedy Tri (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-undang Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I*, 4, 1.
- Indrawati, Sherlin. (2015). Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5*, 3, 2.
- KemalaAtikaHayati. (2016). Hak Suara Kreditor Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *USU Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016.
- Nina Yolanda. (2013). Analisis Yuridis Hak Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggung dalam Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 14 No. 3 Tahun 2013.

Rahman Fria. (2016).
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Karya Tulis/Skripsi/Tesis

Ivan Harsono. (2018). *Tinjauan Terhadap Pembatalan Perdamaian dalam PKPU pada Kasus Kepailitan PT Njona Meneer*. (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Nova Hermati Susila Simarmat. (2012).
Kedudukan Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggung dalam Kepailitan Debtur.

Nurjannah Siregar. (2017).
Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dalam Pemungutan Suara dalam Penentuan Perdamaian di Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005. (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).

Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)/ *Burgerlijk Wetboek*.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Internet

Hak Kreditor Separatis Mengikuti Voting Perdamaian dalam PKPU, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57a04911956fe/hak-kreditor-separatis-mengikuti-ivoting-i-perdamaian-dalam-pkpu>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang,

diakses melalui <https://www.bphn.go.id/data/documents/kpkpu.pdf>

Pazia

Pillar

Mercycom Harus Restrukturisasi Utangnya,

diakses melalui <https://jakarta.bisnis.com/read/20170213/16/628446/pazia-pillar-merrycom-harus-restrukturisasi-utangnya>

Proposal

Diterima Kreditur,

Pazia

Lolos

Pailit,

diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/proposal-diterima-kreditur-pazia-lolos-pailit>

Restrukturisasi

PKPU

Pilihan Terbaik Penyelesaian

Utang,

diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/07/11/osxmf6349-restrukturisasi-pkpu-pilihan-terbaik-penyelesaian-utang>